



► KEBIJAKAN PEMDA

Kabupaten/Kota Belum Ajukan PSBB

Sunartono, Hafit Yudi Suprobo
& Ujang Hasanudin
redaksi@harianjogja.com

JOGJA—Pemda DIY memastikan belum ada kabupaten dan kota yang mengajukan permohonan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Wakil Ketua Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY Biwara Yuswantana menyatakan hingga saat ini belum ada kabupaten dan kota yang mengajukan PSBB, sehingga DIY tetap pada status tanggap

darurat. Sesuai rekomendasi dari ahli, tidak harus berstatus PSBB tetapi esensi PSBB justru telah dijalankan seperti memperketat pengawasan di pintu masuk ke DIY. “Memang persuasif tetapi lebih ketat seperti dilakukan pembubaran kerumunan dan edukasi, patroli keliling dibagi wilayah antara DIY bersama kabupaten dan kota, serta memperketat tiga pintu masuk ke wilayah DIY,” katanya Minggu (26/4).

► Halaman 6

Kabupaten/Kota...

Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Jogja Heroe Poerwadi menyatakan sampai Minggu (26/4), berdasarkan data dan kasus Covid-19, Kota Jogja belum perlu mengajukan pelaksanaan PSBB. Dari persyaratan dasar antara seperti jumlah kasus, sebaran dan kecepatan sebarannya, serta transmisi lokal belum terpenuhi.

Meski dengan status tanggap darurat bencana, sejak awal Kota Jogja sudah menjalankan norma-norma yang ada di PSBB.

"Seperti *stay at home*, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, melarang berkumpul dan kerumunan, menjalankan *social* dan *physical distancing*, pembatasan jam buka bagi pasar, toko jejaring, kafe, patroli dan imbauan di jalan dan di kampung. Jadi secara normatif, hampir semua norma kebijakan PSBB sudah dijalankan. Hanya tidak ada pemaksaan dan larangan," ujarnya.

Ia menambahkan melalui upaya yang sudah dilakukan, sampai saat ini, kasus Covid-19 di Jogja terkendali dan stabil cenderung turun.

Meski ada tujuh kasus positif, tapi semuanya berada dalam tiga keluarga, sehingga sebarannya tidak luas.

"Kasus PDP cenderung turun terus. Sedangkan kasus ODP naik turun, tetapi terkait sebagian besar dengan kedatangan orang yang punya riwayat perjalanan luar kota," ucapnya.

Melalui adanya pelarangan mudik serta pemeriksaan ketat di pintu masuk di wilayah DIY, ia yakin arus pendatang yang masuk ke Kota Jogja akan semakin menurun. Sehingga diharapkan dapat menekan angka Covid-19.

"Jadi Kota Jogja masih belum melihat perlunya dilakukan PSBB. Apalagi, menjelang Lebaran ini sudah ada pelarangan mudik dan sudah dilakukan pemeriksaan di sejumlah titik. Ini akan menciptakan kondisi terhentinya lalu lintas orang yg melakukan perjalanan antarkota. Sehingga akan memperkuat dan bisa menekan perkembangan

Covid-19 di Jogja," katanya.

Lonjakan Kasus

Pemkab Sleman juga belum mengajukan PSBB, kecuali terjadi lonjakan kasus yang luar biasa.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman, Joko Hastaryo, mengaku memilih opsi pembatasan sosial berskala kecil (PSBK) dibandingkan PSBB. Walaupun, nomenklatur PSBK sendiri harus dicari terlebih dahulu apa saja yang menjadi referensinya.

"Mungkin kami cari nomenklatur sendiri, seperti pembatasan sosial berskala kecil (PSBK), tapi belum ketemu referensinya. Intinya, setiap ada kasus positif langsung kami lokalisasi sampai satuan kelompok terkecil (bisa keluarga, dasawisma, RT, sampai RW)," ungkap Joko.

Menurut Joko, PSBK akan cukup efektif jika diterapkan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. "Perhitungan kami bisa efektif karena hanya membatasi pergerakan kelompok kecil masyarakat," kata Joko yang juga menjabat sebagai Koordinator Bidang kesehatan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sleman ini.

Joko tidak menampik pemudik yang berasal dari episentrum Covid-19 setiap hari bertambah di wilayah Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, upaya *screening* yang dilakukan oleh gugus tugas penanganan Covid-19 di tingkat RT maupun RW menjadi sangatlah penting.

Sikap serupa juga diambil Pemerintah Kabupaten Bantul. Alasannya karena belum ada penularan yang meluas dari penyakit yang disebabkan oleh virus SARS CoV-2 tersebut. Meski fakta di lapangan menunjukkan sudah ada penularan atau transmisi lokal.

Transmisi lokal ini terjadi di Kecamatan Sewon, Bantul. Kasus bermula dari laki-laki berusia 45 tahun yang positif terinfeksi Covid-19 dan dirawat di RS Jogja. Pasien yang sudah dinyatakan sembuh pada 18 Maret lalu itu kemudian menularkan ke istrinya, masing-masing perempuan berusia 13 tahun dan 39 tahun.

"Untuk yang di Sewon masih kami katakan belum merupakan penularan lokal di Kabupaten Bantul. Masih merupakan penularan terbatas di tempat tersebut. Di wilayah tersebut juga sudah dilakukan rapid test terhadap orang-orang yang ada kontak erat dan hasilnya negatif," kata Juru Bicara Percepatan Percepatan Penanganan Penularan Infeksi Covid Bantul, Sri Wahyu Joko Santoso, Minggu.

Menurut Oky, sapaan akrab Sri Wahyu Joko Santoso, penularan Covid-19 yang terjadi di Sewon baru penularan setempat dan belum dikatakan penularan lokal se-Bantul. Ia menjelaskan transmisi lokal Bantul baru terjadi ketika ada penularan dari generasi pertama kepada generasi kedua dan penularan di generasi kedua tersebut, kata dia, terjadi meluas, tidak hanya terjadi di wilayah atau dusun atau desa tertentu.

Menular sampai ke luar wilayah pun, diakui Oky, perlu dianalisa lebih lanjut apakah benar-benar tertular dari generasi pertama dan kedua tersebut. Dengan demikian pihaknya menyatakan sampai saat ini belum ditemukan adanya transmisi lokal.

"Itu [yang di Sewon] baru setempat belum lokal, belum bisa dikatakan lokal. Itu penularan terbatas. Misal tenaga medis merawat orang di ruang isolasi ada gejala *rapid test* positif atau *swab* positif belum tentu penularan lokal, karena dia merawat di situ saja," ujar Oky.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Helmi Jamharis mengatakan proses pengajuan PSBB akan menunggu sikap dari Gubernur DIY. Menurut dia, PSBB yang akan diajukan juga tentunya megacu pada usulan Dinas Kesehatan dan kabupaten/kota. "Kami yang ada di kabupaten akan mengikuti apa pun kebijakan yang diambil Pemda DIY," kata Helmi.

Disinggung soal kesiapan PSBB Bantul, Helmi mengaku belum ada yang dipersiapkan. Namun demikian ia memastikan jika sudah ada kebijakan dari Gubernur DIY soal PSBB pihaknya siap menjalankannya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005